

Dr. Hendri Saparini (Direktur Econit Advisory Group)

"NU HARUS MENDORONG PADA LEVEL LEGISLASI"

Sebenarnya seperti apa sistem ekonomi Indonesia yang berjalan saat ini?

Kalau bicara ekonomi Indonesia, khususnya sejak krisis 1998, jelas kita menuju pada ekonomi liberal. Karena sejak krisis tahun 1998-2003 kemudian diperpanjang 2005 kita menyepakati LoI (*Letter of Intence*) di mana setiap 3 bulan, pemerintah dengan IMF menyepakati apa yang harus atau akan dilakukan kaitannya dengan kebijakan perekonomian.

Selama kurun waktu itu, kebijakan ekonomi kita sudah digariskan dalam LoI. Misalnya LoI tahun 1998 bulan November, menyatakan bahwa indikator keberhasilan ekonomi akan tercapai kalau bulan itu (November) pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM dan membuka pasar untuk impor pertanian. Saat itu kita baru tanda tangan dengan IMF, tetapi sudah ada persyaratan segera membuka pasar impor pangan. Artinya ini dilakukan tanpa persiapan sama sekali. Tiba-tiba kita harus membuka pasar, tiba-tiba kita harus menaikkan harga BBM. Tanpa tahu apa dampaknya terhadap ekonomi kita, yang ternyata menimbulkan *chaos*.



Pertanyaan bagaimana sumberdaya alam dan strategi ekonomi pembangunan kita, itu membingungkan karena sudah dipagari oleh Undang-undang. Kita sudah dipagari oleh UU Migas No. 22 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa kita harus mengikuti tren pengelolaan migas global yang sistem pengelolannya liberal. Jadi apa yang harus dilakukan, Undang-undang apa yang harus diterbitkan oleh pemerintah, sudah ada dalam LoI tadi.

Mau bicara industri, pemerintah Indonesia harus meliberalisasi rotan. Apa hubungannya dengan rotan, ternyata tahun 2005 ini dileberalisasi. Rotan diperbolehkan ekspor. Ini bisa membuat seolah-olah petani rotan untung, karena permintaan internasional banyak, lebih kontinyu dan pembayarannya lancar. Tapi dalam jangka panjang itu membahayakan. Mulai 2005, kita impor furniture rotan dari Cina di mana Cina tak memiliki 1 batang rotan pun.

Kita tidak punya cita-cita dan *guideline* dalam mengelola ekonomi. LoI tahun 2003 oleh MPR minta diselesaikan, tapi oleh Budiono diperpanjang. Melalui *Cross Program Monitoring* selama 2 tahun akhirnya diperpanjang sampai 2005. Maka lahir peraturan privatisasi air, lalu ada Undang-undang penanaman modal tahun 2005. Kita sudah tidak punya arah kecuali menuju pada liberalisasi. Setiap hutang itu mensyaratkan kesepakatan-kesepakatan.

Apakah ada kemungkinan dan peluang mewujudkan ekonomi komunitas?

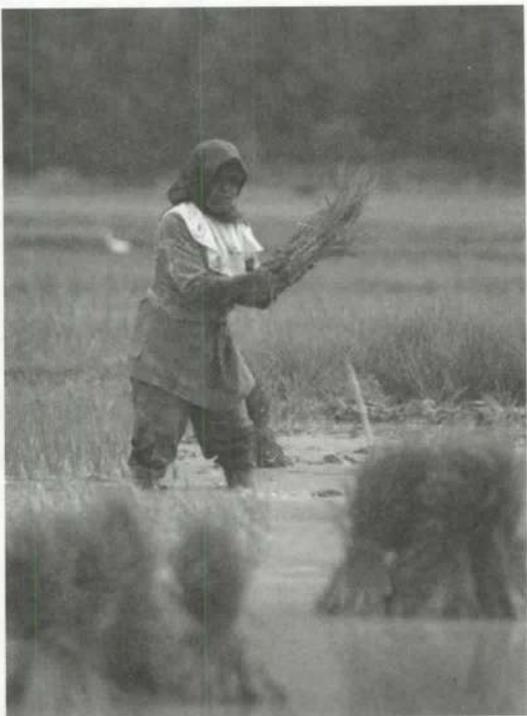
Sangat besar, Ekonomi Kecil Menengah atau UKM. Tinggal bagaimana caranya. Kalau melihat dari sisi jumlah UKM/Unit usaha itu mencapai 99%. Dari sisi penciptaan lapangan kerja, juga 90%. Terdapat 90% lapangan kerja yang bergerak dalam ekonomi mereka (UKM).

Yang harus dipikirkan, kita mau konsentrasi pada sektor apa? Untuk mendorong pertanian apa yang harus dilakukan, berarti harus membangun infrastruktur penunjang seperti transportasi, membangun irigasinya, membangun jalan desa, mempersiapkan marketing. Dan pemerintah bisa melakukan ini.

Kita harus menata perdagangan pertanian, kita harus mengoreksi pembukaan liberalisasi pertanian. Karena kalau tidak, kita akhirnya menjadi negara yang masuk dalam perangkap impor pangan. Lihat saja impor susu sampai 80%, impor kedelai sampai 70%. Jadi kebijakan perdagangan itu harus dikoreksi.

Misalnya sektor pertanian, petani kalau disuruh menanam pasti mau. Yang menjadi pertanyaan hasil panennya mau diapakan? Karena selalu yang terjadi, petani menanam bawang putih, datang impor bawang putih; petani menanam cabai, datang impor cabai. Artinya ada kebijakan perdagangan yang harus dikoreksi, di antaranya persoalan tata pasar.

Setelah itu kita bisa beranjak ke sektor industri. Di Indonesia banyak daerah-daerah penghasil kopra yang batok kelapanya tidak dipakai. Kalau batok kelapa diolah menjadi arang ini bisa diekspor. Maka, tuntunlah ke mana harus



diekspor. Kalau ini telah terjadi, ini akan bergerak.

Dalam hal ini harus ada tangan pemerintah. Harus disediakan lembaga pendukung riset, lembaga ekspornya, dll. Ini menunjukkan adanya strategi menggerakkan ekonomi menengah tanpa harus melupakan perusahaan-perusahaan besar. Karena kita tidak bisa melakukan dikotomi, misalnya hanya memperhatikan ekonomi kecil.

Warga NU itu sebagian besar sebarannya di pedesaan. Pengembangan ekonomi seperti apa yang paling cocok?

Tergantung dari karakteristik desa. Tidak bisa dipaksakan. Bahkan untuk lembaga keuangan pun tidak bisa diseragamkan. Karena ada wilayah di Jawa

Timur misalnya, suka dengan model Gramen Bank, ada yang cocok dengan koperasi. Lihat karakteristik desa, lihat sektor yang akan dikembangkan, sektor pendukungnya, pendekatannya apa. Sebenarnya seluruh Indonesia itu bisa diidentifikasi apakah model pesisir, pertanian, perdagangan, dll. Pemerintah atas inisiatif NU membuat produk unggulan apa saja. Itu dibiayai oleh pemerintah. Misalnya unggulan kerajinan kerja sama dengan NU.

Modelnya?

Kerjasama dengan pemerintah, dana dari pemerintah jangan dititipkan kepada organisasi/lembaga seperti NU. Karena harus ditetapkan dulu jenis programnya. Pembiayaan tetap oleh lembaga pembiayaan seperti bank. Karena kalau dititipkan ke organisasi, itu sifatnya *charity*. Masyarakat itu susah menangkap dana-dana jenis ini, selain itu tidak akan jelas arahnya akan ke mana.

Piloting project dengan memetakan keunggulan suatu desa, misalnya dalam 1 tahun terpilih 25 produk unggulan, ini tinggal digerakkan saja. Yang layak ekspor mana? Saya kira, NU tidak bisa sendirian. Harus bekerja sama dengan lainnya.

Bagaiman peran kiai?

Masyarakat itu tidak bisa menerjemahkan masalah mereka, misalnya kenapa sepi pembeli, kenapa tidak laku. Ternyata ada kebijakan yang menyebabkan ritel-ritel asing masuk dengan deras. Ekonomi rakyat atau pedagang kecil

porak-poranda. Di sini peran kiai ada pada jalur advokasi warga dan pada jalur perubahan kebijakan.

Di Korea, bisnis ritel asing hanya diperbolehkan 3 %, di Jepang 1 %, di Indonesia 13 %, dan tidak ada pembatasan. Pemerintah menganggap masuknya bisnis ini membuat senang masyarakat. Masyarakat senang belanja di Carrefour, tanpa memberitahukan siapa yang dirugikan, bagaimana ekonomi skala nasional, bagaimana ekonomi kecil, warung-warung rakyat. Kalau yang ada hanya Carrefour, ke mana masyarakat akan belanja kalau tidak di situ. Ini jelas harus diregulasi, ditata kembali.

Masyarakat itu harus diadvokasi dan digerakkan. Saya mengajar pengajian di pasar Bekasi. Mereka faham ketika dijelaskan mengapa sekarang kebutuhan pokok naik, ekonomi mereka turun. Mereka merasakan dampaknya saja tanpa tahu hulunya. Dengan memberikan penjelasan, mereka akan sadar dan akan mudah digerakkan, termasuk dalam mendorong adanya perubahan kebijakan. Dalam hal ini, akan ada partisipasi politik mereka untuk menuju perubahan kebijakan. Selama ini kan partisipasi mereka hanya di Pemilu saja. Ini jelas mereduksi makna partisipasi.

Elit NU itu harus menggerakkan masyarakat. Elit NU bisa menggerakkan atau memberikan perhatian pada ekonomi. Lalu elit NU menyampaikan kepada masyarakat kenapa mereka mendorong perubahan kebijakan yang berkaitan dengan bisnis ritel. Itu bisa dijelaskan oleh elit NU bahwa itu dapat mempo-

rak-porandakan bisnis kecil masyarakat. Dampaknya begini, faktanya begini. Ini masyarakat pasti akan faham situasi kesulitan ekonomi yang mereka alami ini sumbernya dari mana.

Persaingan membuat mereka hancur, peraturan yang membuat mereka begitu. Kita membangun kekuatan melalui komunitas. Dakwah itu juga harus urusan ekonomi, karena itu menyangkut hajat hidup umat. Saya kira, urusan ekonomi juga merupakan persoalan keagamaan. Orang Islam harus yakin soal kerja keras. Ulama NU tinggal mengkaitkan saja soal mendorong pergerakan ekonomi.

Ada dua level pergerakan dalam bidang ekonomi, yaitu menjadi pelaku ekonomi dan bergerak mengubah atau mengoreksi kebijakan ekonomi. Apakah NU sudah melakukan itu? Ini adalah persoalan syariat dan harus digalakkan.

NU punya Bank Nussuma, BPR nya ada sekitar 2000-an, ada juga beberapa UKM yang dikelola oleh warga NU. Nah perbankan model ini kan kalau disandingkan dengan Bank-Bank besar mudah tergilas dan ditinggalkan nasabah, pandangan ibu?

Liberalisasi sektor keuangan termasuk sektor perbankan di mana bank asing yang modalnya besar bisa menguasai bank kita sampai 99%. Tadinya dalam undang-undang penanaman modal hanya 95 % karena ada liberalisasi jadi sampai 99%. Perusahaan besar tadi termasuk perbankan, melihat ada pasar potensial di Indonesia. Karena tidak ada pembatasan segmentasi pasar, maka

bank-bank besar tadi masuk ke desa-desa yang seharusnya menjadi pasarnya BPR-BPR. Sekarang ada KSP miliknya Danamon, unit simpan-pinjamnya. Ini memang diperbolehkan hingga mporak-porandakan tatanan bahkan institusi keuangan di level masyarakat.

Kita bandingkan dengan Cina. Di sana ada pasar-pasar, seperti kita punya pasar Jatinegara, Tanah Abang. Di sana tidak diperbolehkan *credit card* asing dipergunakan di pasar tersebut. Di kita justru kebalikannya. Sehingga kompetisinya bareng antara yang kecil dan besar. Tentu saja yang kecil kalah. Masyarakat biasanya lebih merasa nyaman menabung di bank besar, tetapi giliran meminjam itu ke bank-bank milik NU tadi. Ini repot. Karena tidak ada segmentasi usaha dari setiap unit lembaga pembiayaan.

Lalu strategi apa yang bisa dilakukannya?

Ya, memang ada yang bisa dilakukan seperti meningkatkan efisiensi, meningkatkan marketing, tetapi tetap saja ini masalahnya konsumen, akan memilih mana yang lebih aman. Untuk itu pemerintah harus didorong menata segmen pasar. Jadi kalau wilayahnya BPR termasuk lembaga keuangan mikro, itu tidak boleh dirambah oleh bank-bank besar. Bisa juga memikirkan produk apa yang boleh diproduksi oleh bank besar, produk apa yang boleh digunakan atau diproduksi oleh BPR. Saat ini tidak ada aturan.

Dengan kenyataan ini, apakah pe-

merintah bisa diharapkan pemihakannya pada masyarakat kecil?

Sebenarnya bisa. Karena kalau merujuk pada keputusan BI pada arsitektur perbankan Indonesia, mereka harus segera melakukan konsolidasi. Mereka akan memilih di wilayah mana. Ini harus dengan campur tangan pemerintah. Karena kalau kita melakukan sendiri, kita tidak punya daya upaya membendung arus liberalisasi. Misalnya impor pakaian itu 77% dari Cina yang legal dan yang ilegal. Lalu kita menghimbau jangan beli produk impor dengan mengatakan walapun mahal dan jelek, beli saja produk sendiri. Itu kan sebuah upaya yang sulit. Mau bertahan sampai kapan masyarakat kecil harus membeli produk yang mahal. Efektifitasnya berapa. Tidak ada keputusan pemerintah menutup melarang baju ilegal. Kalau itu ditutup dengan sanksi yang luar biasa, penegakan hukum yang kuat, kemudian ditata perdagangannya.

NU sebagai institusi kemasyarakatan harus melihat fakta-fakta lapangan seperti ini. Biasanya ini tidak dimasuki. Liberalisme itu menyebabkan pasar seperti banjir. Kalau kita tidak menutup tanggulnya, itu sia-sia walapun kita bersihkan lumpur-lumpuranya. Kita berusaha sendiri padahal ada kebocoran kebijakan sebagai tanggul penata ekonominya yang bocor.

Ketika NU dan organisasi kemasyarakatan didirikan salah satu gerakannya adalah konsolidasi ekonomi, namun gerakan itu kian melemah apalagi

pasca 1955 yang arusnya politik. Kenapa konsolidasi ekonomi terus melemah?

Ya, makanya kalau kita mau balik lagi, apa yang harus dilakukan adalah mendorong pemerintah, baik itu DPR, eksekutif, DPRD untuk membawa isu ini. Kajian terhadap masalah ekonomi sangat banyak. NU harus mendorong pada level legislasi. Ini yang harus dilakukan oleh para elit NU. Bahan kajian tentang ini sangat banyak. Daya tarik NU sangat besar. Ini harus dimainkan mau ke mana? Harus ada penataan ekonomi masyarakat bawah.

Apa strategi gerakan ekonomi yang bisa dimainkan NU?

Membuat *piloting project* yang sifatnya implementatif, sambil terus mendorong perubahan kebijakan. Anggota NU yang memiliki dana besar itu pasti banyak sekali, ini harus digerakkan yang sifatnya juga politis.

Membuat *piloting project* desa yang didukung oleh lembaga-lembaga NU yang banyak akan sangat menarik sebagai sebuah gerakan ekonomi. Dapat dipilih desa dengan keunggulan masing-masing. Ini tidak harus didanai oleh masyarakat sendiri atau NU, misalnya bisa melalui PNM ada atau dana-dana dari dinas pemerintahan. NU yang mendorong dan mengawal. Kalau masyarakat digerakkan oleh NU yang pengurusannya sampai

desa dan konsisten, pemerintah akan mempertimbangkan.

Sifat ekonomi mikro itu *imitate*, lalu kembangkan infrastruktur, marketing-nya. Ini mudah sekali, gerakan ini jangan melupakan peran elit NU untuk terus mendorong perubahan kebijakan.

Persoalannya di NU, aset-aset pendidikan dan ekonomi kebanyakan bukan milik organisasi, tapi individu. Hanya Bank Nussuma yang kepemilikan asetnya oleh PBNU. Bagaimana pandangan ibu?

Kalau menurut saya, aset-aset semacam itu memang tidak harus dimiliki oleh NU, tapi NU ikut menggerakkan saja. Menggerakkan warga NU untuk membuat seperti yang tadi, lembaga pendidikan, unit usaha dll. Kalau itu harus dimiliki NU, itu panjang karena harus mengayakan organisasi. Beda dengan organisasi Muhammadiyah misalnya, akumulasi kapital Muhammadiyah sudah tertata. Jadi memang tidak harus PBNU itu yang memiliki asetnya.

Dalam hal ini pemimpin NU harus mendorong pada pergerakan itu. Dengan menggunakan bahasa yang mudah, masyarakat akan faham. Para ulama jauh lebih pintar dari yang dibayangkan, sangat bisa melakukan ini. Kajian tentang menggerakkan ekonomi itu banyak. []